

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 2015, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dempster, Quentin, 2001, *Whistleblowers*, terj. Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: PT Sinar Baru.
- Effendy, Marwan, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia.

- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- J., Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, C.S.T., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni.
- M.W., Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahman, Soerjono Abdul, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Surbakti, Natangsa & Sudaryono, 2005, *Hukum Pidana 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suseno, Sigit, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Karya Ilmiah

Hapsari, Maria Yudithia Ayu, 2012, *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Universitas Indonesia.

International Workshop on The Protection of Whistle Blower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LPSK bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Mulyadi, Lilik, “*Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-3, 2014.

Internet

Hukum Online, Jum’at, 6 April 2012: *Fungsi Saksi Verbalisan*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan>, diunduh Selasa, 6 Maret 2018 pukul 22:48 WIB.

Hukum Online, Jum’at, 25 Mei 2012: *Definisi Saksi Mahkota*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, diunduh Selasa, 6 Maret 2018 pukul 22:32 WIB.

Hukum Online, Jum’at, 10 Januari 2014: *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota-dan-alibi>, diunduh Selasa, 6 Maret 2018 pukul 23:04 WIB.

HukumOnline.com, Rabu 11 Juni 2014, *Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>, diunduh Minggu 31 Desember 2017 pukul 12:36.

Hukum Online, Selasa, 02 Mei 2017: *Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator>, diunduh Sabtu, 16 September 2017 pukul 02:06 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Sejarah Kejaksaan Indonesia*, dalam https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diunduh Sabtu, 6 Januari 2018 pukul 23:21 WIB.

Lalola Easter, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, *Indonesian Corruption Watch*, Kompas, 22 Januari 2018, Negara Hukum, *Problematika "Justice Collaborator" Untuk Setya Novanto*, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/problematika-justice-collaborator-untuk-setya-novanto.html>, diunduh Sabtu 24 Maret 2018, pukul 13:53 WIB.

PN Sabang Kelas II A, Selasa, 14 Januari 2014: *Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*, dalam <http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656>, diunduh Selasa, 6 Maret 2018 pukul 22:55 WIB.

Sindonews.com, Jum'at, 12 Januari 2018, *Pakar Pidana: Status Justice Collaborator Bukan untuk Pelaku Utama*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1273077/13/pakar-pidana-status-justice-collaborator-bukan-untuk-pelaku-utama-1515734278>, diunduh Sabtu 24 Maret 2018, pukul 14:00 WIB.

Peraturan/Perundangan

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.